

BAB 1

PENDAHULUAN

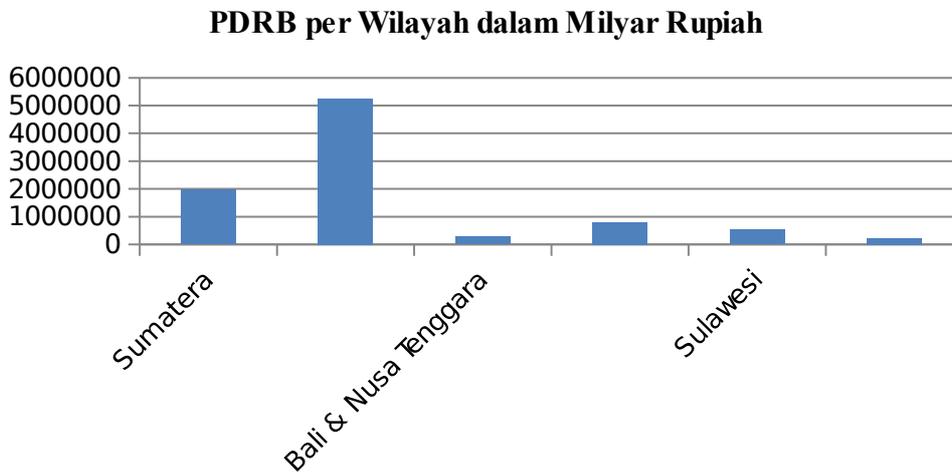
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kurniawan (2010) dalam singgih (2016) salah satu indikator keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, diikuti oleh daya masyarakat yang semakin meningkat (Yunan, 2009). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan makin meningkatnya aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.

Setiap wilayah pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat karena perekonomian yang kuat dapat menimbulkan stabilitas harga sehingga menciptakan kesempatan kerja penuh (*full employment*) bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai jika pertumbuhan suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk karena indikator keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat melalui pendapatan perkapita akan tetapi juga dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dalam harga konstan yang harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2010).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh faktor perekonomian disuatu wilayah dimana jumlah nilai tersebut berupa barang dan jasa yang di hasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Berikut gambaran

Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan tahun 2010 di wilayah Indonesia dapat di lihat di gambar 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017

Gambar 1.1 PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Wilayah Pulau di Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat pada tahun 2015, wilayah Jawa memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu sebesar Rp5.250 miliar, wilayah Sumatera memiliki total PDRB Rp.1.960 miliar dan wilayah Kalimantan Rp.790 miliar dan posisi PDRB terendah adalah Maluku & Papua yakni sebesar Rp.228 miliar di Indonesia. Menurut Tarigan (2014) pada konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

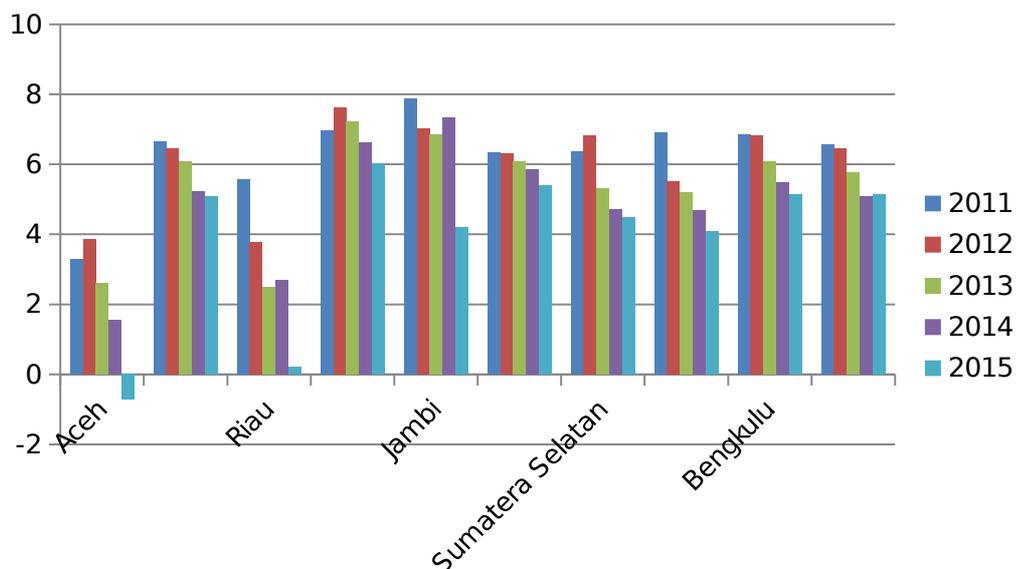
Dalam perhitungan produk domestik regional bruto, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar yang digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (2013:425) suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran apabila pendapatan perkapita menurut harga tetap (konstan) terus menerus bertambah dari tahun ketahun. Berikut adalah gambaran laju

pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 menurut provinsi di Pulau Sumatera dapat di lihat pada tabel 1.1

sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,72
Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10
Riau	5,57	3,76	2,48	2,70	0,22
Kepulauan riau	6,96	7,63	7,21	6,62	6,02
Jambi	7,86	7,03	6,84	7,35	4,21
Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,86	5,41
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,70	4,50
Bangka Belitung	6,90	5,50	5,20	4,67	4,08
Bengkulu	6,85	6,83	6,07	5,48	5,14
Lampung	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2015

Gambar 1.2 Tren Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2011-2015

Berdasarkan data PDRB Provinsi pulau Sumatera dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa PDRB provinsi di pulau Sumatera mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan PDRB menunjukkan kegairahan ekonomi suatu wilayah karena ekonomi di wilayah tersebut telah bergerak dan berekspansi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Octavianingrum, 2015), Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki kekayaan dengan hasil bumi, dengan jumlah provinsi terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 10 provinsi. Dari 10 provinsi tersebut terdapat tiga dari lima provinsi kaya di Indonesia yaitu Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama pulau Sumatera ialah minyak bumi, kelapa sawit, tembakau, timah, bauksit, gas alam dan batu bara, akan tetapi pada kenyataannya laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan provinsi di Pulau Sumatera terjadi penurunan setiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Todaro (2006) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menjadi acuan kemakmuran masyarakat dan mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi, jadi jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka dapat dikatakan wilayah tersebut telah berkembang dengan baik.

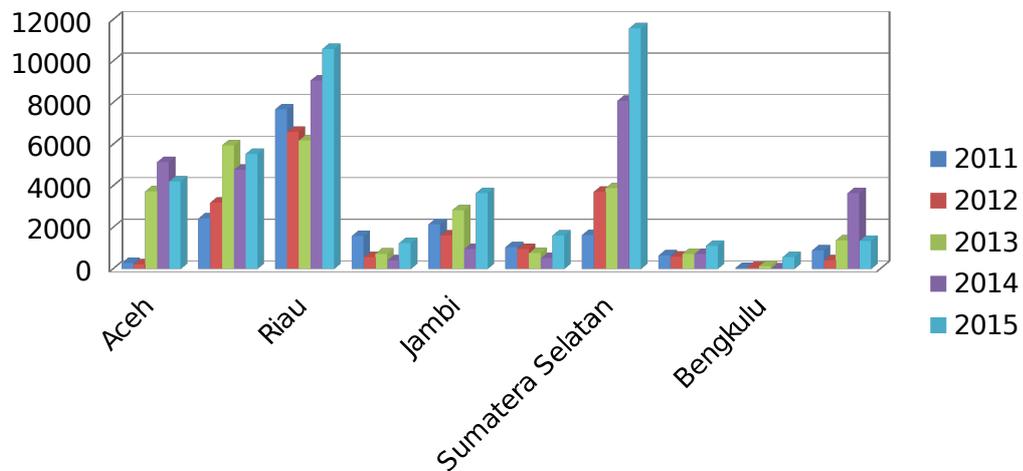
Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi serta menciptakan lapangan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga nantinya akan mengurangi pengangguran, hal ini dapat merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Investasi disini terbagi menjadi dua bagian, menurut Undang-Undang No.25 tahun 2007 yang pertama ada penanaman modal asing (PMA), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berikut adalah gambaran total investasi antara PMA dan PMDN di provinsi pulau Sumatera pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Total Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	281,9	232,5	3.730,6	5.141,4	4.213,6
Sumatera Utara	2.426,7	3.195,6	5.956,3	4.774,6	5.533,5
Riau	7.674,9	6.603,3	6.179,2	9.077,1	10.596,4
Kepulauan Riau	1.590,1	580,6	733,4	420,6	1.252,5
Jambi	2.154,4	1.602,0	2.833,9	959,4	3.648,0
Sumatera Barat	1.049,2	960,3	769,1	533,2	1.609,6
Sumatera Selatan	1.626,2	3.717,0	3.881,9	8.099,3	11.589,9
Bangka Belitung	660,4	592,6	720,6	720,5	1.106,4
Bengkulu	43,1	83,1	131,9	27,1	574,5
Lampung	903,9	418,5	1.372,1	3.652,2	1.360,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017

Gambar 1.3 Tren Total Investasi Pma dan Pmdn di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

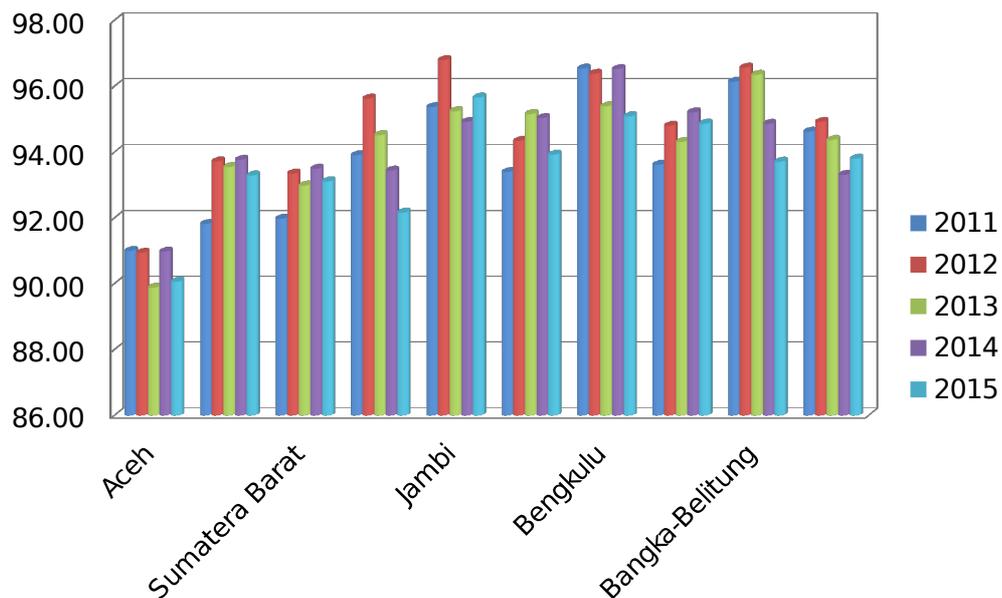
Dapat dilihat dari gambar di 1.3 jumlah rata-rata total investasi PMA dan PMDN yang terus meningkat ialah wilayah provinsi Sumatera Selatan yakni mencapai total sebesar 28.914,3 miliar sedangkan wilayah Bengkulu berada di tingkatan terendah daripada provinsi lain di pulau Sumatera hanya mencapai sebesar 859,7 miliar hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan pembiayaan pembangunan dari investor, dengan kata lain minat investor di wilayah Bengkulu ini relatif rendah.

Tenaga kerja termasuk faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk yang besar pada usia produktif maka akan dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Gambaran jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3 Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	1.790.369	1.808.357	1.842.671	1.931.823	1.966.018
Sumatera Utara	5.532.968	5.880.885	6.081.301	5.881.371	5.962.304
Riau	2.311.171	2.399.851	2.479.493	2.518.485	2.554.296
Kepulauan Riau	763.349	801.510	806.073	819.656	836.670
Jambi	1.393.554	1.436.527	1.397.247	1.491.038	1.550.403
Sumatera Barat	2.051.696	2.085.483	2.061.109	2.180.336	2.184.599
Sumatera Selatan	3.417.374	3.582.099	3.524.883	2.692.806	3.695.866
Bangka Belitung	555.258	585.493	597.613	604.223	623.949
Bengkulu	837.674	853.784	832.048	868.794	904.317
Lampung	3.368.486	3.516.856	3.471.602	3.673.158	3.635.258

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017



5

umber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017

Gambar 1.4 Tren Pertumbuhan Angkatan Kerja di Wilayah Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

Berdasarkan gambar 1.4 dapat di ketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2011-2015 dari keseluruhan jumlah angkatan kerja yang ada di Pulau Sumatera rata-rata sudah lebih dari 90% dan sisanya adalah pengangguran, akan tetapi

dalam kurun waktu tersebut jumlah angkatan kerja di pulau Sumatera terjadi penurunan. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia di Pulau Sumatera belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan percepatan ekonomi lokal.

Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang dapat digunakan adalah tersedianya sumberdaya yang berkualitas. Sumberdaya alam maupun manusia diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Investasi SDM sangat penting khususnya bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang pada umumnya ingin meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Investasi SDM ini dapat dilakukan dengan melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar bagi manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

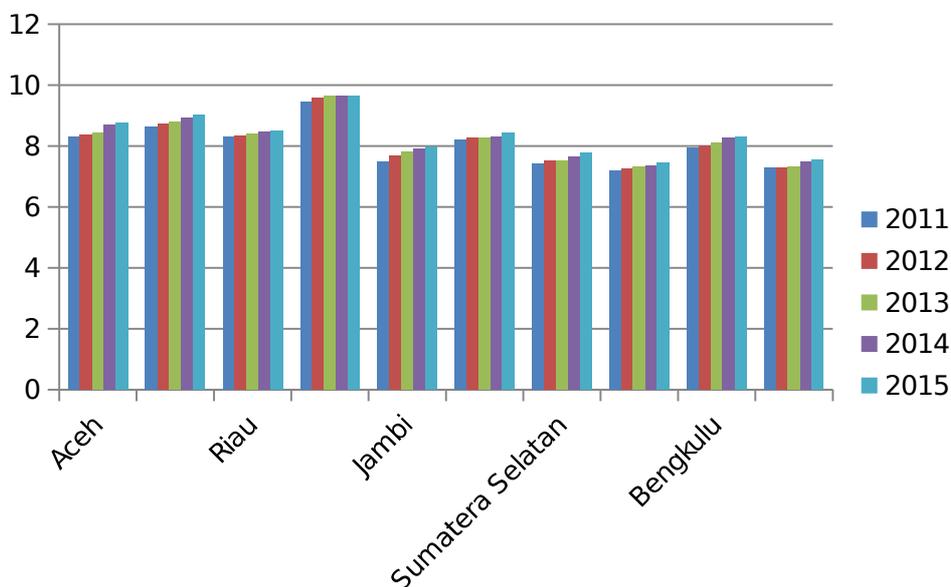
Dalam teori *human capital* dijelaskan pentingnya meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan pendidikan. SDM yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Apabila kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan, maka produktivitas penduduk akan meningkat. Dengan demikian, maka angka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut semakin meningkat. Sementara itu, upaya dalam mengukur kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan melihat Rata-Rata Usia Lama Sekolah (RLS). Dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk di pulau Sumatera untuk tahun 2011-2015 sebagaimana terdapat pada tabel 1.4 adalah sebagai berikut

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Pendudukan Dengan Rata-Rata Usia Lama Sekolah Berusia 15 Tahun di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	8,32	8,36	8,44	8,71	8,77
Sumatera Utara	8,61	8,72	8,79	8,93	9,03
Riau	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49

Kepulauan Riau	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65
Jambi	7,48	7,69	7,8	7,92	7,96
Sumatera Barat	8,2	8,27	8,28	8,29	8,42
Sumatera Selatan	7,42	7,5	7,53	7,66	7,77
Bangka Belitung	7,19	7,25	7,32	7,35	7,46
Bengkulu	7,93	8,01	8,09	8,28	8,29
Lampung	7,28	7,3	7,32	7,48	7,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017



Sumb

er: Badan Pusat Statistik, Data Diolah Tahun 2017

Gambar 1.5 Tren Pertumbuhan Pendudukan Dengan Rata-Rata Usia Lama Sekolah Berusia 15 Tahun di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015

Berdasarkan gambar 1.5 penduduk di wilayah Pulau Sumatera cenderung meningkat setiap tahunnya, provinsi dengan angka tertinggi yaitu Kepulauan Riau dengan total jumlah sebesar 47,96% dan provinsi dengan angka terendah yaitu Bangka Belitung dengan total jumlah sebesar 36,57%.

Selain dari tingkat pendidikan, anggaran belanja daerah yang ada dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) menunjukkan kinerja pemerintah

daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen belanja daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (DJPK, 2015). Berdasarkan peraturan pemerintah No.24 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi belanja daerah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu; belanja modal dan belanja operasi. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan belanja operasi adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan.

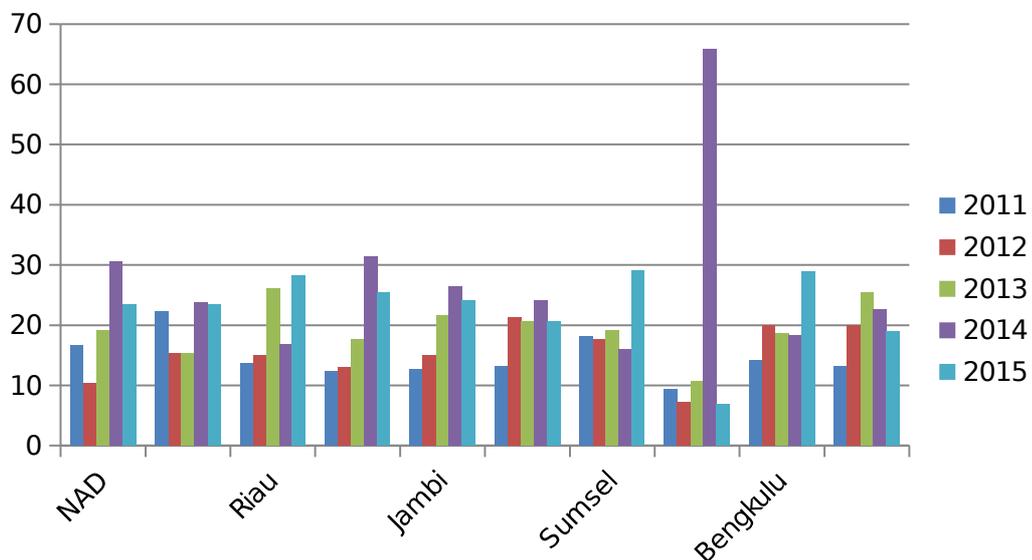
Berikut adalah realisasi belanja modal pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.5 jumlah belanja modal terbesar di pulau Sumatera adalah provinsi Riau sedangkan jumlah belanja modal terendah adalah provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi pada belanja modal pulau Sumatera sendiri mengalami penurunan dan dapat di lihat pada gambar 1.6. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pemerintah dalam memperbaiki ataupun membangun infrastruktur-infrastruktur publik melalui peningkatan belanja modal daerah masih perlu di tingkatkan.

Tabel 1.5 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 Dalam Jutaan Rupiah

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	1610313	1000060	1855440	2967172	2278118
Sumatera Utara	1322549	909034	912589	1412927	1394811
Riau	1409598	1549481	2687869	1730359	2901125
Kepulauan Riau	318025	334380	453128	802559	649113
Jambi	418291	494919	716102	874874	797315

Sumatera Barat	450395	725887	700403	822707	704695
Sumatera Selatan	1043620	1011789	1099140	922274	1676693
Bangka Belitung	424567	322566	482352	2967172	310690
Bengkulu	229697	321610	300141	294253	465402
Lampung	499169	757583	970168	857027	720312

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah Tahun 2017



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah Tahun 2017

Gambar 1.6 Tren Rata-Rata Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 Dalam Persen

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. - Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?
 - Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?
 - Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?
 - Apakah belanja modal pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?
2. Apakah investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan belanja modal pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan tahun 2011-2015 di provinsi pulau Sumatera tahun 2011-2015
2. Total jumlah investasi (PMA dan PMDN) pemerintah di provinsi pulau Sumatera tahun 2011-2015
3. Jumlah tenaga kerja di provinsi pulau Sumatera tahun 2011-2015
4. Tingkat pendidikan di provinsi pulau Sumatera tahun 2011-2015
5. Belanja modal pemerintah di provinsi pulau Sumatera tahun 2011-2015

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi pulau Sumatera
2. Mengetahui besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Sumatera
3. Mengetahui besarnya tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Sumatera
4. Mengetahui besarnya belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Sumatera
5. Mengetahui besarnya investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan, belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Sumatera

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan media belajar untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan menambah ilmu tentang investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi pemerintah

i. Investasi

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk lebih memfokuskan apa yang menjadi minat investor dalam berinvestasi sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi lebih baik.

ii. Tenaga kerja

Sebagai acuan pemerintah untuk meningkatkan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak agar dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

iii. Tingkat pendidikan

Sebagai pertimbangan pertimbangan pemerintah untuk memberikan program-program di bidang pendidikan agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

iv. Belanja modal pemerintah

Sebagai evaluasi pemerintah untuk lebih meningkatkan alokasi belanja modal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat teoritis

a. Menambah wawasan pada bidang ekonomi terutama mengenai pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera

b. Memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan

c. Menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya